



**REVISI
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
MAKRO DAN OUTCOME
DALAM LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2022
BERDASARKAN
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) TAHUN 2023
TERHADAP LPPD TAHUN 2022**





REVISI
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
MAKRO DAN OUTCOME DALAM LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD) TAHUN 2022 BERDASARKAN HASIL
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (EPPD) TAHUN 2023 TERHADAP LPPD TAHUN 2022

Kabupaten Bantul
Provinsi D. I. Yogyakarta
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat bersama-sama menyelesaikan kewajiban kami dalam mengemban amanah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2022 dengan baik dan lancar serta menyelesaikan penyusunan dokumen Revisi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Makro dan Outcome dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 Terhadap LPPD Tahun 2022 dengan tepat waktu.

LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah disusun dan dilaporkan tepat waktu sesuai amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, rangkaian EPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Surat Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.7/4094/OTDA tanggal 6 Juni 2023 dan Nomor 100.2.6.3/4626/OTDA tanggal 23 Juni 2023. EPPD Tahun 2023 oleh Tim Daerah EPPD D.I.Yogyakarta diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2023 dan Uji Petik terhadap EPPD Tahun 2023 oleh Tim Nasional EPPD diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2023.

Rangkaian pelaksanaan EPPD Tahun 2023 yang diakhiri dengan Uji Petik oleh Tim Nasional EPPD tersebut menghasilkan sejumlah revisi terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Makro dan Outcome. Revisi capaian IKK Makro dan Outcome telah ditindaklanjuti dan diselesaikan, serta telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Bantul, melalui aplikasi resmi SILPPD (<https://elppd.kemendagri.go.id/>) secara tepat waktu. Di dalam dokumen revisi ini kami sampaikan capaian keseluruhan IKK Makro dan Outcome sebelum evaluasi dan setelah evaluasi sehingga dapat diketahui dinamika perubahan capaian IKK berdasarkan hasil EPPD Tahun 2023.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen revisi ini. Semoga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sesuai hasil evaluasi oleh Tim Daerah EPPD maupun Tim Nasional EPPD, serta menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul supaya memacu kinerja ke depan untuk lebih optimal.

Bantul, 07 Agustus 2023

The official stamp of the Bupati of Bantul is circular, featuring the Garuda Pancasila emblem in the center. The text "BUPATI BANTUL" is written in a semi-circle above the emblem, and "KABUPATEN BANTUL" is written in a semi-circle below it. The stamp is overlaid with a blue ink signature and the name "H. ABDUL HALIM MUSLIH" printed below it.

H. ABDUL HALIM MUSLIH

I. Revisi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome pada Indeks Makro, Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Indeks Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Penunjang Sebelum dan Setelah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 Berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 oleh Tim Daerah EPPD D.I.Yogyakarta dan Uji Petik Terhadap EPPD Tahun 2023 oleh Tim Nasional EPPD

Tabel 1.1. Matriks Penyandingan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome pada Indeks Makro, Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Indeks Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Indeks Capaian Urusan Pemerintahan Penunjang Sebelum dan Setelah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 Berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 oleh Tim Daerah EPPD D.I.Yogyakarta dan Uji Petik Terhadap EPPD Tahun 2023 oleh Tim Nasional EPPD

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
INDEKS MAKRO								
CAPAIAN MAKRO DAERAH								
1	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022	80,69	0,511%	80,69	0,511%	TETAP	
		Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021	80,28		80,28			
2	Laju Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan Tahun 2022	12,27	-12,731%	12,27	-12,731%	TETAP	
		Angka Kemiskinan Tahun 2021	14,06		14,06			
3	Laju Penurunan Angka Pengangguran	Angka Pengangguran Tahun 2022	3,97	-1,73%	3,97	-1,73%	TETAP	
		Angka Pengangguran Tahun 2021	4,04		4,04			
4	Laju Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun 2022	5,20	4,63%	20808,83	5,20%	BERUBAH	Data pembilang dan penyebut semula diperoleh dari angka laju pertumbuhan ekonomi dalam persen. Berdasarkan catatan penegasan IKK oleh Kemendagri dan EPPD Tahun 2023 oleh Tim Daerah DIY bahwa data pembilang dan penyebut yang digunakan adalah Nilai PDRB ADHK Tahun 2022 dalam miliar rupiah yang diambil dari dokumen Kabupaten Bantul dalam Angka 2023.
		Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun 20121	4,97		19779,66			
5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	Pendapatan Per Kapita Tahun 2022	30,79	9,34%	30,79	9,34%	TETAP	Satuan dalam ribu rupiah.
		Pendapatan Per Kapita Tahun 2021	28,16		28,16			
6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2022	0,41	-7,03%	0,41	-7,03%	TETAP	
		Ketimpangan Pendapatan Tahun 2021	0,441		0,441			
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN (WAJIB)								
1	PENDIDIKAN							
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	27.288	105,63%	27.108	104,93%	BERUBAH	- Setelah dilakukan pengecekan kembali terhadap data IKK 1.a.1 s.d. 1.a.4 yang bersumber dari data riil Dapodik Dinas Dikpora Kabupaten Bantul dan EMIS (Education Management System)
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	25.834		25.834			

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	85.283	101,18%	85.283	101,18%	TETAP	<p>Kementerian Agama yang diolah menjadi Data Individu Sekolah, serta Rekap Data Siswa dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) D.I. Yogyakarta tahun 2022, terdapat perubahan jumlah data Pembilang pada IKK 1.a.1 dan 1.a.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil koordinasi dengan Ditjen EKPDK Kemendagri pada tanggal 20 Juli 2023, bahwa: <ul style="list-style-type: none"> a. untuk IKK Pendidikan diberikan toleransi deviasi capaian maksimal sampai dengan 105% karena masih mengakomodir perhitungan warga negara dari luar Kabupaten yang bersekolah di Kabupaten tersebut atau sebaliknya, warga negara dari Kabupaten tersebut yang bersekolah di luar Kabupaten. b. Input capaian IKK Outcome 1.a.1 dan 1.a.2 pada aplikasi SILPPD dilakukan pembulatan 100%. - Data Penyebut yang digunakan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2022 dari Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul. - Bukti dukung dirinci dengan menambahkan kolom sekolah negeri dan swasta, serta ditambah surat keterangan bagi capaian IKK lebih dari 100% (Surat Keterangan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Bantul No. 400.3.12/1929/Prog/2023, tanggal 24 Juli 2023).
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan	84.291		84.291			
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	44.235	98,89%	44.354	99,15%	BERUBAH	
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	44.732		44.732			
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2.382	13,51%	2.382	13,51%	TETAP	
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	17.634		17.634			
2	KESEHATAN							
1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	1.351	0,0014011	1.351	0,0014011	TETAP	
		Jumlah penduduk di kabupaten/kota	964.245		964.245			
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	12	75,00%	12	92,31%	BERUBAH	
		Jumlah RS di kabupaten/kota	16		13			

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
								<p>Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; menyebutkan bahwa penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi merupakan kewenangan Provinsi.</p> <p>Tiga RS Tipe B yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU dr. S. Hardjolukito, dan RS. Paru Respira tidak termasuk dalam penyebut karena menjadi kewenangan Provinsi dan menjadi capaian kinerja Provinsi.</p>
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.514	96,51%	10.514	96,51%	TETAP	
		Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	10.894		10.894			
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	10.885	99,92%	10.885	99,92%	TETAP	
		Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	10.894		10.894			
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	8.990	83,02%	8.990	83,02%	TETAP	
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	10.829		10.829			
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	49.818	87,08%	49.818	87,08%	TETAP	
		Jumlah balita di kabupaten/kota	57.211		57.211			
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	117.696	96,45%	117.696	96,45%	TETAP	
		Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	122.027		122.027			
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	234.862	44,04%	234.862	44,04%	TETAP	
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	533.295		533.295			
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77.422	53,53%	77.422	53,53%	TETAP	
		Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	144.640		144.640			

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4.393	11,25%	4.393	11,25%	TETAP	Penambahan bukti dukung berupa Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul Nomor B/400.7.10/00015 Tanggal 18 Juli 2023 yang menerangkan bahwa pencapaian SPM untuk pelayanan kesehatan orang dengan Hipertensi dan pelayanan kesehatan orang dengan Diabetes Mellitus belum sesuai dengan target yang diharapkan (masih rendah) karena: 1. Kepatuhan kontrol pasien penderita hipertensi ke Puskesmas masih rendah. 2. Kepatuhan kontrol pasien penderita diabetes mellitus ke Puskesmas masih rendah. 3. Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan Swasta belum maksimal yang menyebabkan pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi maupun diabetes mellitus yang mengakses Fasyankes di luar Puskesmas belum optimal.
		Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	39.053		39.053			
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4.754	30,23%	4.754	30,23%	TETAP	
		Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	15.727		15.727			
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2.344	84,20%	2.344	84,20%	TETAP	
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	2.784		2.784			
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	10.244	98,51%	10.244	98,51%	TETAP	
		Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	10.399		10.399			
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	18.008	100,00%	18.008	100,00%	TETAP	
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota	18.008		18.008			
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	1	100,00%	1	100,00%	TETAP	

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
	banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1		1			
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	1	100,00%	1	100,00%	TETAP	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1		1			
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan pelihara (ha)	6.946,82	80,459%	6.946,82	80,46%	TETAP	
		luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	8.634		8.634			
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	338.013	100,406%	338.013	100,00%	BERUBAH	Data penyebut sebelumnya menggunakan jumlah proyeksi rumah tangga dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dari Dinas PUPKP Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil Uji Petik EPPD Tahun 2023 bahwa jumlah penyebut menggunakan riil jumlah rumah tangga pada tahun 2022 (sumber data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul).
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	336.646		338.013			
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	338.013	100,406%	338.013	100,00%	BERUBAH	
		Jumlah rumah di kabupaten/ kota	336.646		338.013			
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	130.188	100,00%	130.188	100,00%	TETAP	
		Jumlah IMB yang berlaku	130.188		130.188			
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota yang mantap	473,566	75,83%	473,566	75,83%	TETAP	Panjang jalan dalam kondisi baik : 278.47 Km Panjang jalan dalam kondisi sedang : 195.10 Km
		Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	624,47		624,47			
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	1.279	84,98%	1.279	84,98%	TETAP	Dokumen bukti dukung memuat perincian BNBA tenaga operator bersertifikat dan menyertakan sampel sertifikat minimal 3 (tiga) sertifikat.

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	1.505		1.505			
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	167	100,00%	167	100,00%	TETAP	
		jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	167		167			
3	PERUMAHAN							
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022	0	0,00%	1	100,00%	BERUBAH	Tidak terjadi bencana yang mengakibatkan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, namun sudah ada perencanaan maka diisi 1/1.
		jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	3		1			
1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	-	1	100,00%	BERUBAH	Tidak terdapat fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota karena tidak ada program pemerintah yang menyebabkan relokasi, maka diisi 1/1.
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	0		1			
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	97,89	49,90%	33,56	37,56%	BERUBAH	Penyesuaian data Kawasan kumuh <10 Ha, berdasarkan Surat Pernyataan Kepala

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
	10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	196,19		89,36		Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Nomor B/400.9.14.3/00002, tanggal 24 Juli 2023, bahwa : 1. Terdapat perubahan data penentuan kewenangan kawasan kumuh <10 Ha, yang awalnya merupakan akumulasi sampai dengan titik lokasi kawasan kumuh dalam satu dusun, menjadi kawasan dalam satu kalurahan/desa. 2. Sehubungan dengan hal tersebut, terjadi perubahan data kawasan kumuh <10 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bantul dari 196,19 Ha menjadi 89,36 Ha. 3. Dengan demikian, jumlah penanganan kawasan kumuh <10 Ha juga mengalami perubahan dari 49,90% menjadi 37,56%.	
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	2.741 373.893	0,73%	2.741 373.893	0,73%	TETAP	
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah unit perumahan kabupaten/kota	25 192	13,02%	25 192	13,02%	TETAP	
5	TRANTIBUMLINMAS							
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	165 165	100,00%	165 165	100,00%	TETAP	
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	19 25	76,00%	19 25	76,00%	TETAP	
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	8.500	100,00%	8.500	100,00%	TETAP	

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	8.500		8.500			
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	964.245	100,00%	964.245	100,00%	TETAP	
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	964.245		964.245			
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	100,00%	1	100,00%	TETAP	
		Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	1		1			
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab kota dala tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	126	100,00%	126	100,00%	TETAP	
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	126		126			
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	8,20	8,20	8,20	8,20	TETAP	
6	SOSIAL							
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	14.525	100,00%	14.525	100,00%	TETAP	
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	14.525		14.525			

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	700	100,00%	700	100,00%	TETAP	
		Populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	700		700			
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1	KETENAGAKERJAAN							
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	9	100,00%	9	100,00%	TETAP	
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	9		9			
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	8.748	36,859%	8.748	36,859%	TETAP	Penambahan bukti dukung berupa sampel sertifikat per individu per jenis pelatihan.
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan	23.734		23.734			
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	20.808.830.000.000	3.459.604.641,883	20.808.830.000.000	3.459.604.641,883	TETAP	
		Jumlah tenaga kerja	601.480		601.480			
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	203	66,997%	203	66,997%	TETAP	
		Jumlah perusahaan	303		303			
2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3.681	54,437%	3.681	54,437%	TETAP	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar	6.762		6.762			
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	191.836.967.873	10,006%	190.381.370.577	9,797%	BERUBAH	Penyesuaian data realisasi keuangan berstatus Audit BPK RI.
		Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	1.917.282.768.076		1.943.275.706.687,10			
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	72	100,00%	72	100,00%	TETAP	

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
		Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)	72		72			
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	88	18,2935	88	18,1629	BERUBAH Penyesuaian jumlah penduduk Perempuan berdasarkan data agregat kependudukan Semester 2 Tahun 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.	
		Jumlah penduduk perempuan	481.044		484.503			
3	PANGAN							
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	15,036	150,36%	15,036	150,36%	TETAP	
		Jumlah kebutuhan pangan	10		10			
4	PERTANAHAN							
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi	485.620,45	98,836%	485.620,45	98,836%	TETAP	
		Seluruh luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi	491.339,45		491.339,45			
2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	391	100,00%	391	100,00%	TETAP	
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	391		391			
2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	7.952	26,43%	7.952	26,43%	TETAP	
		Luas izin lokasi yang diterbitkan	30.087		30.087			
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	0	-	1	100,00%	BERUBAH Tidak tersedia TOL, diisi 1//1.	
		Jumlah pemerima tanah obyek landreform	0		1			
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	0	-	1	100,00%	BERUBAH Tidak tersedianya tanah untuk masyarakat diisi 1/1.	
		luas izin membuka tanah yang diterbitkan	0		1			
2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	20	100,00%	20	100,00%	TETAP	
		Jumlah pengaduan sengketa tana garapan	20		20			
5	LINGKUNGAN HIDUP							
2.j.1		Indeks Kualitas Air (IKA)	36,67	62,84608	36,67	62,84608	TETAP	

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,34		86,34			
		Indeks Tutupan Hutan (IKTL)	64,34		64,34			
2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	409.826,99	63,56%	409.826,99	63,56%	TETAP	
		Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	644.819,13		644.819,13			
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota	20	83,33%	19	79,17%	BERUBAH	
		usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	24		24			
6	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							
2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	739.629	98,65%	739.629	98,65%	TETAP	
		Jumlah penduduk wajib KTP-el	749.759		749.759			
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	189.707	88,45%	189.707	88,45%	TETAP	
		Jumlah anak usia 0-17 tahun	214.483		214.483			
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	227.539	99,58%	227.539	99,58%	TETAP	
		Jumlah anak usia 0-18 tahun	228.500		228.500			
2.k.1.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	24	53,33%	24	53,33%	TETAP	
		Jumlah OPD	45		45			
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1	100,00%	1	100,00%	TETAP	
		Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	1		1			
2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1	100,00%	1	100,00%	TETAP	
		Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	1		1			
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB							

Tidak terdapat perubahan capaian pada IKK 2.l.1 dan IKK 2.l.2. Perubahan terdapat pada input Reviu APIP pada aplikasi <https://elppd.kemendagri.go.id/> yang sebelumnya OK menjadi TDI

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	1,657877	1,657877	1,657877	1,657877	TETAP	
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	102.014	73,50%	102.014	73,50%	TETAP	
		Jumlah pasangan usia subur	138.790		138.790			
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	12.971	9,35%	12.971	9,35%	TETAP	
		Jumlah Pasangan Usia Subur	138.790		138.790			
9	PERHUBUNGAN							
2.n.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	bobot angkutan jalan (IK1)	38,46	38,46	0,3846	0,3846	BERUBAH	Penyesuaian pada faktor pengali bobot angkutan jalan bagi kabupaten/ kota yang tidak memiliki angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, tertulis di pedoman penyusunan LPPD sebesar 100. Berdasarkan penjelasan Kemendagri bahwa angka 100 tersebut dimaknai sebagai 100% atau 1. "IK1: Jumlah trayek yang dilayani = 10; bobot trayek =1; bobot angkutan jalan = 100%; Jumlah trayek yang dibutuhkan = 26 IK2 : 0; Rasio konektivitas kabupaten/kota = (((10 X 1)/26) x 100%) = 0,3846"
		bobot angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (IK2)	0		0			
2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	1,68	1,68	1,68	1,68	TETAP	VCR Jl. Jend. Sudirman = 0,45; VCR Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo = 0,42; Jl. KH. Wahid Hasyim = 0,39; Jl. Prof. Dr. Supomo, SH = 0,42 VCR = 0,45 + 0,42 + 0,39 + 0,42 = 1,68
10	KOMINFO							
2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	45	100,00%	45	100,00%	TETAP	
		Jumlah OPD	45		45			
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18	94,74%	18	94,74%	TETAP	
		Jumlah layanan publik	19		19			

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	955.567	99,10%	955.567	99,10%	TETAP	
		Jumlah penduduk	964.245		964.245			
11	KOPERASI DAN UKM							
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	107	38,77%	107	38,77%	TETAP	
		Jumlah seluruh koperasi	276		276			
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	19.669	22,65%	19.669	22,65%	TETAP	
		Jumlah usaha mikro keseluruhan	86.833		86.833			
12	PENANAMAN MODAL							
2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2022	2.193.856.422.696,10	28,4852%	2.193.856.422.696,10	28,4852%	TETAP	
		Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2021	1.707.477.617.696,05		1.707.477.617.696,05			
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	8.249	4,07%	8.249	4,09%	BERUBAH	Penyesuaian jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota berdasarkan data agregat kependudukan Semester 2 Tahun 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	202.528		201.855			
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	9.815	4,85%	9.815	4,86%	BERUBAH	
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	202.528		201.855			
2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	31	31	31	31	TETAP	
14	STATISTIK							
2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	45	100,00%	45	100,00%	TETAP	
		Jumlah OPD	45		45			

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
2.s.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	45	100,00%	45	100,00%	TETAP	
		Jumlah OPD	45		45			
15	PERSANDIAN							
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	4,16	83,20%	531	82,33%	BERUBAH	Penyesuaian perhitungan, yang awalnya menggunakan nilai persentase dari skor pada masing-masing area keamanan (pembilang) dan jumlah area penilaian (penyebut), menjadi menggunakan nilai total capaian SKOR pada kelima area keamanan informasi (pembilang) dan nilai total maksimal skor pada ke-5 area keamanan informasi (penyebut).
		Jumlah area penilaian	5		645			
16	BUDAYA							
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	169	62,13%	169	62,13%	TETAP	
		Jumlah cagar budaya yang terdata	272		272			
17	PERPUSTAKAAN							
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	58,26	58,26	58,26	58,26	TETAP	
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	65,71	65,71	65,71	65,71	TETAP	
18	KEARSIPAN							
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	69,96	78,435	69,96	78,435	TETAP	
		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	90,09		90,09			
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	81,6		81,6			
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	72,09		72,09			

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100	100,00%	100	100,00%	TETAP	
		Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	100		100			
		Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	100		100			
		O+G192K	100		100			
		Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	100		100			
		Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	100		100			
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN (PILIHAN)								
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	13.966,25	102,93%	13.966,25	102,93%	TETAP	
		Target Produksi Perikanan	13.569		13.569			
2	PARIWISATA							
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2022	315	452,63%	315	452,63%	TETAP	
		Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2021	57		57			
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara tahun 2022	5.687.414	101,70%	5.687.414	101,70%	TETAP	
		Jumlah wisatawan nusantara tahun 2021	2.819.691		2.819.691			
3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	50.909	47,93%	50.909	47,93%	TETAP	
		Jumlah kamar yang tersedia	106.215		106.215			
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3.735.560.000.000	11,97%	3.735.560.000.000	11,97%	TETAP	
		Total PBRB harga berlaku	31.197.830.000.000		31.197.830.000.000			
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata	57.267.511.559,30	26,56%	49.212.160.035,70	9,10%	BERUBAH	Penyesuaian data realisasi keuangan berstatus Audit BPK RI.
		Jumlah total PAD	215.631.865.732,74		540.572.423.372,80			

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
3	PERTANIAN							
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	218.715,39	709,54%	218.715,39	709,54%	TETAP	
		Luas Panen	30.825,16		30.825,16			
3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2022	3.856	-	3.856	-	TETAP	
		Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2021	0		0			
4	KEHUTANAN							
3.d	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kehutanan bukan kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten, tetapi ditarik menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kabupaten Bantul tidak melaksanakan urusan Kehutanan (diterangkan melalui Surat Keterangan Sekretaris Daerah No.061/0559/ TAPEM tanggal 30 Januari 2023).					TETAP		
5	ESDM							
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	1	100,00%	1	100,00%	TETAP	Kabupaten Bantul tidak melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (diterangkan melalui Surat Keterangan Sekretaris Daerah No.061/0559/ TAPEM tanggal 30 Januari 2023).
		Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1		1			
6	PERDAGANGAN							
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	303	68,40%	303	68,40%	TETAP	
		Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	443		443			
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	14.681,36	26,53%	14.681,36	26,53%	TETAP	
		Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	55.336,55		55.336,55			
3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	9.272	39,87%	9.272	39,87%	TETAP	
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	23.257		23.257			
7	PERINDUSTRIAN							
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2022	25.934	1,93%	25.934	1,934%	TETAP	
		Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021	25.442		25.442			

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	0	0	0	TETAP	
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1	100%	1	100%	TETAP	
		Jumlah izin yang dikeluarkan	1	1	1			
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	-	1	100,00%	BERUBAH	Pada tahun 2022 tidak ada industri kecil dan industri menengah yang mengajukan IPIU (Surat Keterangan Kepala Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul). Berdasarkan hasil EPPD Tahun 2023 oleh Tim Daerah DIY, capaian diisikan 1/1.
		Jumlah izin yang dikeluarkan	0		1			
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	-	1	100,00%	BERUBAH	Terdapat satu perusahaan memiliki IUKI yaitu PT. Yogyakarta Isti Parama (PT. YIP). Monitoring dilakukan melalui akun SIINAS milik Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil EPPD Tahun 2023 oleh Tim Daerah DIY, capaian diisikan 1/1.
		Jumlah izin yang dikeluarkan	0		1			
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Keterkinian informasi industri - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan(25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	50%	90%	50%	90%	TETAP	
		Kelengkapan informasi industri meliputi - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi investasi (10%)	40%		40%			
8	TRANSMIGRASI							
3.h	Tidak Terdapat Indikator Outcome untuk Urusan Transmigrasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; sedangkan capaian pada IKK Output TDI, Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 560/374 tgl 23 Januari 2023, bahwa Kab. Bantul bukan sebagai daerah penempatan Transmigrasi					TETAP		

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN (PENUNJANG)								
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN							
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	272.683.559.752,00	12,14%	272.683.559.752,00	12,00%	BERUBAH	Penyesuaian data realisasi keuangan berstatus Audit BPK RI.
		Total belanja APBD	2.246.481.649.585,13		2.272.247.588.197,10			
4.a.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD	540.572.423.372,80	24,19%	540.572.423.372,80	23,91%	BERUBAH	
		Jumlah PDRB Non Migas	2.234.584.500.583,50		2.260.577.439.195,50			
4.a.3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Mauritas SPIP	3	3	3	3	TETAP	
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP	3	3	3	3	TETAP	
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Total Belanja Urusan Pemerintahan	2.024.783.229.827,32	72,19%	2.050.776.168.439,32	71,369%	BERUBAH	Penyesuaian data realisasi keuangan berstatus Audit BPK RI.
		Tranfer expenditures	402.945.446.860,08		428.938.385.472,08			
		Total belanja APBD	2.246.481.649.585,13		2.272.474.588.197,10			
4.a.6	Opini BPK atas Laporan Keuangan			8		10	BERUBAH	Penyesuaian data berdasarkan OPINI BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2022.
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022	-			WTP			
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021	WTP			WTP			
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020	WTP			WTP			
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019	WTP			WTP			
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018	WTP			WTP			
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017	WTP			WTP			
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016	WTP			WTP			
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015	WTP			WTP			
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014	WTP			WTP			
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013	-			WTP			
2	PENGADAAN							
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022	0	0,00%	0	0,00%	TETAP	Tidak terdapat kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang pembangunannya memerlukan waktu 3 (tiga) kuartal dan ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022 (Pernyataan No 027/ 00470/ PBJ, tanggal 24 Januari 2023)
		Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022	1.857		1.857			
4.b.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1.857	70,37%	1.857	41,30%	BERUBAH	Dalam pedoman penyusunan LPPD disebutkan bahwa penyebut merupakan jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif. Kemudian pada saat EPPD Tahun 2023 terdapat penyesuaian berdasarkan catatan penegasan IKK oleh Kemendagri bahwa data yang digunakan
		Jumlah keseluruhan pengadaan baik yang dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif	2.639		4.496			

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
							untuk penyebut adalah jumlah seluruh pengadaan.	
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan.	1.063.940.394.728,13	55,49%	1.089.933.333.340,10	56,09%	BERUBAH	Penyesuaian data realisasi keuangan berstatus Audit BPK RI.
		total belanja operasional dan modal	1.917.282.768.076,13		1.943.275.706.688,10			
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)	1.031.153.045.779,13	244,3892%	1.057.145.984.391,13	253,0705%	BERUBAH	Pada IKK 4.b.3. Jumlah nilai belanja operasional dan modal melalui pengadaan diperoleh dari realisasi belanja: barang dan jasa (768.495.409.619,24), hibah (91.629.103.963,08), bantuan sosial (8.110.400.000,00), dan modal (221.698.419.757,81)
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	299.415.004.831,00		299.415.004.831,00			Pada IKK 4.b.4. Jumlah nilai realisasi PBJ dengan menggunakan sumber data LRA audited 11 April 2023 (1.089.933.333.340,13) dikurangi jumlah nilai PBJ impor sumber data dari Siera tanggal 21 Februari 2023 (32.787.348.949,00)
3	KEPEGAWAIAN							
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	1.300	53,74%	1.300	53,74%	TETAP	
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.419		2.419			
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	438	18,11%	438	18,11%	TETAP	
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.419		2.419			
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	92	21,00%	92	21,00%	TETAP	
		Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	438		438			
4	MANAJEMEN KEUANGAN							
4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	2.246.481.649.585,13	0,041%	2.272.474.588.197,10	1,115%	BERUBAH	Penyesuaian data realisasi keuangan berstatus Audit BPK RI.
		Total belanja APBD dikurangi satu	2.247.414.065.054,00		2.247.414.065.054,00			

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Komponen Rumus IKK	Capaian Tahun 2022				BERUBAH/ TETAP	Keterangan
			Sebelum Evaluasi (per 31 Maret 2023)		Setelah Evaluasi (per 31 Juli 2023)			
			Komponen	Capaian IKK	Komponen	Capaian IKK		
4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	540.572.423.372,80	6,244%	540.572.423.372,80	6,244%	TETAP	
		Total PAD dalam APBD dikurangi satu	508.804.008.396,00		508.804.008.396,00			
4.d.3	Assets Management	Total Assets Management		4		4	TETAP	
		1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya		Ya			
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya		Ya			
		3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya		Ya			
		4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya		Ya			
4.d.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	215.631.865.732,74	9,68%	215.631.865.732,74	9,68%	TETAP	
		Total belanja anggaran tahun sebelumnya	2.226.588.267.594,90		2.226.588.267.594,90			
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	45	100,00%	45	100,00%	TETAP	
		Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	45		45			
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	12	100,00%	12	100,00%	TETAP	
		Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12		12			

II. Instrumen/ Data Tambahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 berdasarkan Lampiran I Surat Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 100.2.6.3/4626/OTDA, Tanggal : 23 Juni 2023

Berdasarkan angka 3 Surat Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 100.2.6.3/4626/OTDA, Tanggal : 23 Juni 2023, Hal: Pelaksanaan Uji Petik Terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 Berdasarkan LPPD Tahun 2022 oleh Tim Nasional EPPD, Pemerintah Daerah diminta untuk mengisi instrumen/data tambahan tahun 2022.

Instrumen/data tambahan tahun 2022 tersebut meliputi 9 (sembilan) aspek pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Tabel 1.2. berikut.

Tabel 1.2. Matriks Capaian Instrumen/ Data Tambahan EPPD Tahun 2023

No	Aspek Pemerintahan Daerah	Rumusan	Elemen Data	Capaian	Keterangan/ PD Penyedia Sumber Data	
1	Kelembagaan dan Kepegawaian					
a	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	Jabatan Struktural yang terisi (Definitif)	518	97,37%	BKPSDM	
		Jabatan Struktural yang ada	532			
b	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun 2022	Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional	7	8,14%		
		Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional	86			
2	Perencanaan					
a	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Perpres No. 85 Tahun 2021	Program-Program yang Mendukung 7 Program Prioritas Nasional	271	271		BAPPEDA
3	Keuangan Daerah					
a	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2022	Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2022	1.331.879.489.034,85	93,35%	BPKPAD	
		Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2022	1.426.708.288.728,00			
b		Nilai SILPA Tahun 2021	240.503.861.658,33	-11,53%		

No	Aspek Pemerintahan Daerah	Rumusan	Elemen Data	Capaian	Keterangan/ PD Penyedia Sumber Data
	Persentase Penurunan SILPA	Nilai SILPA Tahun 2022	215.631.865.732,74		
c	Pertambahan Nilai Aset Tetap	Nilai Aset Tetap Tahun 2021	5.567.495.257.507,79	3,65%	
		Nilai Aset Tetap Tahun 2022	5.778.683.830.804,99		
4	Hubungan Eksekutif dan Legislatif				
a	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2022	Tepat atau Tidak Tepat	Tepat	Tepat	BAGIAN HUKUM
b	Persentase Penetapan RanPerda Tahun 2022	Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun 2022	12	92,31%	
		Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun 2022	13		
5	Pengawasan				
a	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022	35	100,00%	INSPEKTORAT
		Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022	35		
b	Opini BPK Tahun Anggaran 2022	WTP/WDP/TMP	WTP	WTP	
6	Pelayanan Publik				
a	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022	91	91	BAGIAN ORGANISASI
b	Keberadaan Mall Pelayanan Publik	Ada atau Tidak	ADA	ADA	DPMPSTP
c	Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 38/2017)	Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat)	156	156	BAPPEDA
7	Kepatuhan dan Ketaatan Hukum Pemda				
a	Monitoring Center for Prevention Tahun 2022	Nilai MCP Tahun 2022	93	93	INSPEKTORAT

No	Aspek Pemerintahan Daerah	Rumusan	Elemen Data	Capaian	Keterangan/ PD Penyedia Sumber Data
8	Kerjasama Daerah				
a	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama yang masih berlaku dan manfaatnya	146	146	BAGIAN TAPEM
9	Pemerintahan Umum				
a	Jumlah Penanganan Konflik Tahun 2022	Jumlah Penanganan Konflik Tahun 2022	1	1	BADAN KESBANGPOL

